

SKRIPSI

**TUGAS & FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOIRI,
KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



DI SUSUN OLEH :

ISAK SUBRATA

(12520057)/IP

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2016

**TUGAS & FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOGIRI,
KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana

pada jurusan Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Isak Subrata

No. Mhs : 12520057

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sastra S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2016

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD”APMD”

TIM PENGUJI

Dra. Herawati, MPA

Ketua /Penguji/Pembimbing

Gregorius Sahdan, S.IP, MA

Penguji Samping I

Utami Sulistiana, S.P, M.P

Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, MA

HALAMAN MOTTO

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Matius 7:7)

“dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa Kita. ”

(Kolose 3:17)

“Jangan pernah mengatakan; Ya Tuhan, aku punya masalah yang besar, tapi katakanlah; hai masalah, aku punya TUHAN Yang Maha Besar!”

(Merry Riana)

“Jangan berdoa meminta kemudahan tetapi berdoalah meminta kekuatan karna itu yang akan kau butuhkan”

“Melangkahlah dengan penuh iman karna Tuhan telah memiliki rancangan terbaik-NYA untukmu”

“Pemimpin tidak menciptakan pengikut; pemimpin itu menciptakan lebih banyak Pemimpin”

(Tom Pifers)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini telah memberikan motivasi, mendukung, serta memberikan kekuatan sehingga saya dapat bertumbuh hingga saat ini:

1. Dengan segala ucapan syukur saya persembahkan Kepada Tuhan Yesus Kristus yang hingga pada saat ini selalu menuntun, menganugrahkan berkat-NYA memberikan keindahan pada sebuah karya yang telah dibuat, sebuah perjalanan yang panjang untuk menempuh pendidikan dari nol sampai saat ini dan Tuhan Yesus selalu menjadi terang.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua ku, Bapak, Mamak tercinta. Trimakasih buat semua yang sudah Bapak Mamak berikan, Kesabaran, Doa, Dukungan, Nasehat, Senyuman, Tawa, Kasih Sayang dikeluarga kita yang menjadikan kami bisa menyelesaikan studi ini. Didikan dari kecil yang mengajarkan kami kalau hidup itu penuh perjuangan, penuh tantangan dan harus selalu mandiri, sekarang berkat semuanya yang kalian berikan semoga ini bisa menjadi senyuman yang tak terlupakan bagi kalian.
3. Terimakasih juga buat kedua saudaraku Oon Juliarta dan Sesar Arinata, trimakasih untuk dukungan, nasehat dan dorongannya sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan lebih bermakna.
4. Terimakasih juga buat kakek nenek di kampung, keluarga besar Injang Bejeng, Ninak Bejeng, Injang Manis, Ninak Manis, Emang di kampung, di pinoh, di sintang, semua sepupu, keponakan, trimakasih atas semua yang telah kalian berikan, senyuman kalian yang menjadi kekuatan aku selama ini untuk tetap terus berkarya dan berjuang menyelesaikan studi.
5. Terimakasih juga buat keluarga besar Agape, trimakasih atas nasehat, dukungan yang telah kalian berikan selama ini.

6. Terimakasih juga buat semua sahabat yang selama ini selalu menemani, mendukung, memberikan canda tawa, terutama untuk Almarhum Dani, Krisna Rindra, Anggre Lexsi, Nita, Rosela, Andre, Dian, Dewi, Fajar, Adil, Prapti, Dila, Ivan, Dodi, Ulan, Desi, Verinda, Joi, Nensi, kawan-kawan KKN, kawan-kawan Kampus lainnya, kawan-kawan Kos Colombo, kawan-kawan Fokus Mapawi, canda tawa kita tidak akan terlupakan.
7. Terimakasih juga untuk orang yang special yaitu Mitha, terimakasih untuk Dukungan, Nasehat, Suportnya selama ini, kenangan yang takan terlupakan selama kita bersama di yogyakarta.
8. Trimakasih juga buat kak Ndut Damiana, kak Itin, Novita Blensoi, Agesti, trimakasih untuk kebersamaannya selama di Yogyakarta dan makanan yang sering diantar kerumah.
9. Terimakasih juga buat keluarga baru yang terjalin selama di yogya ini, khususnya buat keluarga besar Ibu, Bapak Nur di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara semasa praktikum dan juga keluarga besar di Guyangan khususnya buat Pak Mukiat Sekeluarga, Pak Sugimin Sekeluarga, dan Ibu Sukiem sekeluarga terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmat dan segala kasih-nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan maupun hambatan apapun, skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sastra S-1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Secara substansial skripsi ini bertujuan untuk mengadakan kajian terhadap Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis sangat menyadari berbagai keterbatasan, kekurangan, pengalaman, baik maupun pada ilmu pengetahuan serta wawasan berfikir.

Dalam penyempurnaan skripsi ini banyak sekali pihak yang terkait dalam mendukung maupun membantu penulis dalam menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan penuh segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

3. Ibu Dra. Herawati, MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, nasehat maupun motivasi serta waktunya untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama kuliah.
5. Para dosen dan staf karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Kepada Kepala Desa Sriharjo serta Perangkat Desa lainnya yang telah memberikan ijin, kesempatan, membantu dan mendukung dalam berbagai kegiatan yang diperlukan pada saat penelitian.
7. Bapak Suwandi selaku Ketua LPMD serta anggota kepengurusan LPMD lainnya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam melakukan penelitian.
8. Seluruh Masyarakat Desa Sriharjo yang telah membantu serta memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya dengan berbagai penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Desa Sriharjo dan kepengurusan LPMD agar dapat menjadi bahan koreksi maupun masukan sehingga menghasilkan sebuah ide-ide serta gagasan yang baru.

Yogyakarta, Maret 2016

Isak Subrata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
ABSTRAK	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
D.1 Pengertian Kebijakan	13
D.2. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	16
D.3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	21
E. Ruang Lingkup	32
F. Metode Penelitian	34
F.1 Jenis Penelitian	34
F.2 Unit Analisis	35
F.3 Teknik Pengumpulan Data	36
F.3.a Observasi atau pengamatan	36
F.3.b Wawancara Atau Interview	37
F.3.c Dokumentasi	38

BAB II PROFIL DESA

A. Sejarah Desa -----	48
B. Geografis -----	40
B.1 Letak Desa Sriharjo -----	40
B.2 Batas Wilayah Dan Luas Wilayah. -----	41
B.3.a Batas Wilayah -----	41
B.4.b Luas Wilayah -----	41
C. Demografis -----	42
C.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin-----	43
C.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia -----	43
C.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan-----	45
C.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan -----	46
C.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	47
D. Kondisi Desa Sriharjo -----	48
D.1 Ekonomi-----	48
D.2 Keadaan Sosial dan Budaya -----	49
D.2.a Keadaan Sosial -----	49
D.2.b Keadaan Budaya -----	50
E. Sarana dan Prasarana -----	52
E.1 Sarana Prasarana Pemerintah Desa -----	52
E.2 Sarana Prasarana Agama -----	52
E.3 Sarana Prasarana Kesehatan -----	53
E.4 Sarana Prasarana Pendidikan -----	54
E.5 Sarana Prasarana Olahraga-----	55
E.6 Sarana Prasarana Ketertiban dan Keamanan Lingkungan-----	55
E.7 Sarana Prasarana Informasi dan Tehnologi-----	55
E.8 Sarana Prasarana Ekonomi-----	56
F. Pemerintahan Desa Sriharjo -----	57
F.1 Srtuktur Pemerintah Desa Sriharjo -----	58
F.2 Visi dan Misi Desa Sriharjo-----	59
F.3 Program Kerja Atau Sasaran Pembangunan-----	60

G. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) -----	62
G.1 Tingkat Pendidikan Pengurus LPMD -----	63
G.2 Visi dan Misi LPMD -----	64
G.3 Program Kerja LPMD -----	64

BAB III ANALISIS DATA

A. Analisis Data-----	65
A.1 Deskripsi Narasumber -----	66
A.1.a Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Usia -----	68
A.1.b Deskripsi Narasumber Menurut Jabatan atau Pekerjaan -----	69
A.1.c Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin -----	70
A.1.d Deskripsi narasumber menurut Tingkat Pendidikan-----	71
B.2 Pembahasan -----	72
B.2.a Perencanaan-----	72
B.2.b Pelaksanaan-----	79
B.2.c Evaluasi-----	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan-----	90
B. Saran -----	93

DAFTAR PUSTAKA -----	95
----------------------	----

LAMPIRAN-----	99
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaanya -----	42
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin -----	43
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Usia-----	44
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan-----	45
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan -----	46
Tabel II.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan -----	47
Tabel II.7 Sarana Prasarana Kesehatan -----	53
Tabel II.8 Sarana Prasarana Pendidikan -----	54
Tabel II.9 Data pengurus Pemerintah Desa Sriharjo -----	57
Tabel II.10 Tingkat Pendidikan Kepengurusan LPMD-----	63
Tabel III.1 Deskripsi Informan menurut Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan pekerjaan -----	67
Tabel III.2 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Usia-----	68
Tabel III.3 Deskripsi Narasumber Menurut Jabatan atau Pekerjaan. -----	69
Tabel III.4 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin. -----	70
Tabel III.5 Deskripsi narasumber menurut Tingkat Pendidikan. -----	71

DAFTAR GAMBAR

Peta Desa Sriharjo-----	99
Kantor Desa Sriharjo-----	100
Pukesmas Desa Sriharjo-----	101
Unit Usaha Rempeyek Masyarakat Desa Sriharjo-----	102
Kondisi Jalan Desa Sriharjo -----	103
Fasilitas Olahraga Desa Sriharjo -----	104
Balai Perteuan Desa Sriharjo -----	105
Saluran Drenase Untuk Jalan Dan Sawah Masyarakat-----	106
Potensi Wisata Air Terjun Desa Sriharjo -----	107
Wisata Jembatan Gantung Desa Sriharjo -----	108
Wisata Arung Tenang Desa Sriharjo -----	109
Wawancara Bersama Ketua LPMD-----	110

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh masyarakat yang mandiri dan berdaya (baiknya kualitas sumberdaya manusia) sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dari setiap kegiatan yang dilakukan. Agar masyarakat dapat terlibat langsung dari setiap proses kegiatan maka pemerintah menjadikan masyarakat sebagai sasaran utama dalam fokus pemberdayaan, dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mempercepat proses realisasi suatu pembangunan. Untuk rencana pembangunan semua proses bertumpu pada aspirasi yang berasal dari masyarakat. Hal tersebut dikarnakan masih terdapat beberapa permasalahan seperti, program pemerintah yang belum terlaksana dengan efektif, lemahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan, pergantian kepengurusan lembaga pemberdayaan yang belum tertata dengan baik, sehingga berdampak pada lemahnya kualitas SDM dan pemanfaatan potensi yang belum maksimal.

Skripsi ini berjudul **“Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat”**. Lokasi penelitian terletak di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang di dalamnya mencakup tentang tugas dan fungsi LPMD dalam memberdayakan masyarakat.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat”**. Penelitian dilakukan menggunakan Metode Deskriptif dengan tehnik kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi yang ada di lapangan dan didukung dengan data skunder yang ada. Analisis data dilakukan berupa, mengumpulkan data, menganalisis kemudian diinterpretasikan. Adapun jumlah informan sebanyak 18 orang dan dengan tehnik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian maka memperoleh hasil bahwa Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Sriharjo sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat beberapa kendala. Masyarakat cukup aktif, responsive dan juga antusias masyarakat cukup tinggi dalam setiap proses kegiatan yang lakukan. Ada beberapa proses yang dilakukan LPMD dalam rangka memberdayakan masyarakat, yaitu: 1) masyarakat dapat terlibat langsung untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kebutuhannya dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah dusun yang dibantu oleh Pokgiat (Kelompok Kegiatan) LPMD bersama seluruh tokoh masyarakat, 2) masyarakat diberikan kesempatan dalam berpartisipasi dan terlibat secara langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang telah dibentuk, 3) masyarakat diberikan kesempatan secara langsung untuk mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik maupun saran dari seluruh kegiatan yang dilakukan melalui rapat musyawarah dan laporan pertanggungjawaban. LPMD bersama Pemerintah Desa Sriharjo bertanggungjawab atas setiap proses kegiatan yang berjalan. Adanya tugas dan fungsi LPMD maka diharapkan akan dapat mengurangi tingkat permasalahan di masyarakat, tuntutan kebutuhan yang belum terpenuhi dan juga untuk mempercepat proses pembangunan serta untuk melakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tugas & Fungsi LPMD Dalam Memberdayaan Masyarakat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan menjadi pemberdayaan, maka sebagai titik fokus pemberdayaan saat ini berada pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara lebih partisipatif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan masyarakat yang berdaya.

Kini Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakatlah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat terhadap apa yang dibutuhkan dan juga terhadap berbagai fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraannya, dalam situasi ini Pemerintah diharapkan mampu menjadi sebagai fasilitator dan motivator. Hal ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut terutama melalui pemeritah maupun lembaga yang menjadi kaki tangan pemerintah.

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang "Pemerintah Daerah" yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Untuk menembus hingga level desa maka dikeluarkanlah istilah Otonomi Desa, dengan arti bahwa otonomi desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “Otonomi Asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat *given*. Dengan adanya penjelasan mengenai ketentuan tersebut, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengeluarkan berbagai program tahap demi tahap dan tahun demi tahun, dengan tujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Pada era ini, dengan dikeluarkannya kembali UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui Asas Desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing yang ada di daerah, terutama pada sebuah desa yang merupakan sebuah unit pemerintahan terendah. Artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyangkut Kewenangan Desa Pasal 18 Yaitu Kewenangan Desa Meliputi Kewenangan Dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa. kemudian diperkuat lagi dalam BAB X11 bagian pertama tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, Adat Istiadat Desa, Pasal 94 Ayat (1) Desa Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Ada Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ayat (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa Bertugas Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ikut Serta Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Serta Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui pemberdayaan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini semata-mata dilakukan pemerintah untuk menghormati martabat manusia secara konkrit atau lebih nyata yang berarti menjamin segi-segi asasi manusia, pembangunan sosial harus diperjuangkann guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melibatkan masyarakat dalam membangun potensi yang ada, strategi pemberdayaan yang dibangun juga harus

dilandasi dan beorientasi atas dasar pada kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan harusnya lebih mengejar target pada produksi, dengan mengutamakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga dalam hal ini aktor paling penting yang diharapkan mampu mengembangkan potensi sumber daya yang ada yaitu adalah masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Meningkatkan potensi yang ada di daerah merupakan salah satu cara bagaimana dapat membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada tingkat desa, dengan terlibatnya masyarakat dengan bantuan pemerintah diharapkan juga agar setiap potensi yang ada di daerah mampu dikembangkan dengan baik, ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih kreatif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.

Semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat serta untuk mencapai arah pemberdayaan masyarakat maka perlu adanya sebuah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia meliputi kualitas fisik serta memperhatikan, keselarasan, keserasian serta keseimbangan antar sumber daya manusia dan sumberdaya pendukung agar potensi sumberdaya dapat dikembangkan secara optimal. Kualitas dan mobilitas sumberdaya manusia harus terus dikendalikan serta diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan yang lebih optimal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul. Seperti diketahui, pengentasan masyarakat miskin merupakan salah satu prioritas pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Bantul. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini diimplementasikan melalui berbagai program atau kegiatan baik yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari berbagai sumber lainnya, termasuk dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat ini kebijakan pemerintah terutama pemerintah desa dianggap masih lemah, dengan lemahnya standar kualitas sumberdaya manusia pada lembaga pemberdayaan menyebabkan proses pemberdayaan yang dilakukan masih terlihat tidak optimal. Masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah desa juga yang menjadi perhatian khusus bahwa pentingnya untuk dilakukannya pemberdayaan agar dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan yang telah dilakukan pada saat ini dilihat masih sangat lemah,

masih perlunya perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam membantu pemerintah desa membuat strategi pemberdayaan agar dapat meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 Kabupaten Bantul, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan ke dua. Prioritas pertama adalah tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab, adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan yang ada.

Adapun hal yang menjadi masalah mengapa perlunya dilakukan penelitian ini adalah masih banyaknya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengalami kendala, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan dibidang perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan yang dikeluarkan masih belum tepat, fokus pembangunan yang dilakukan yang dilakukan belum mampu

menjawab setiap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga berdampak dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Berdasarkan pendataan tahun 2011 di Kabupaten Bantul terdapat 40.406 keluarga miskin dengan jumlah jiwa sebesar 128.164 orang atau sekitar 18.4%. Berbagai Program sudah dilakukan untuk mendorong dan mendongkrak taraf hidup masyarakat pedesaan. Berbagai Proyek ataupun program tersebut dilakukan oleh masing-masing departemen maupun antar departemen, akan tetapi Akses yang dimiliki oleh masyarakat dirasakan masih sangat kurang khususnya akses untuk menuju pada kesejahteraan.

Untuk melaksanakan kebijakan tentang pemberdayaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul maka proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alternative, *pertama* pendekatan partisipatif, Pendekatan ini tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. *Kedua*, Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap

pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, dengan memberikan media kelompok bagi masyarakat maka akan dapat mempermudah sebuah proses pemberdayaan yang akan dilakukan, secara swakelola akan dapat melatih pola pikir masyarakat sehingga akan dapat bertumbuh kembang secara lebih mandiri dan aktif.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 7 Ayat (1) LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Salah satu unsur terpenting terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan adanya bantuan dari lembaga kemasyarakatan atau yang sering disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Partisipasi masyarakat merupakan kata kunci utama dalam pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumberdaya, mengarahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Sedangkan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan.

Tetapi ada substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi itu, (Sutoro Eko, 2004) namun makna terdalam partisipasi ada tiga yaitu, voice, akses, dan control warga masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. *Pertama*, voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kegidupan secara kolektif dan mandiri. *Kedua*, akses adalah ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk kedalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan secara terlibat aktif mengelola barang-barang public. *Ketiga*, control warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Artinya control bukan hanya mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, akan tetapi juga merupakan kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap resiko atas tindakan mereka.

Pemberdayaan masyarakat tidak serta merta dapat dilakukan dengan instan oleh aktor pembangunan, didalam lingkungan masyarakat, peran Lembaga Pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai jembatan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat berperan langsung pada pembangunan yang ada didesa, sehingga titik pembangunan yang dilakukan dapat bertumpu kuat atas dasar keperluan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat ini ialah agar masyarakat lebih berdaya, berdaya yang dimaksud ini ialah upaya atau unsur-unsur yang memungkinkan untuk masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Untuk membentuk agar terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dapat berperan bagi masyarakat sebagai wadah organisasi kelembagaan di tingkat desa, yang ditujukan sebagai akses bagi masyarakat untuk menjadi wadah belajar bersama.

Memang banyak organisasi kelembagaan di tingkat desa baik formal maupun non formal, seringkali hanya papan nama dan belum berfungsi secara optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan sebatas ketersediaan dana atau proyek. Ketika dana sudah habis biasanya kegiatan juga berakhir. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan *local leaders* atau *champion* di tingkat masyarakat sebagai motivator yang selalu menggerakkan kegiatan di tingkat masyarakat. Para kader inilah yang perlu mendapatkan pelatihan lebih, karena fungsinya seringkali berkembang menjadi *problem solving* bagi anggota lainnya. Dengan demikian maka perlu dibentuknya sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di wilayah Kabupaten Bantul Kecamatan Imogiri, Desa Sriharjo. Penelitian ini menitik fokuskan pada Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat, penelitian ini dilakukan agar dapat melihat apakah Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberdayakan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), mampu ataupun berhasil

mendongkrak masyarakat agar lebih mandiri dan dapat berpartisipasi, serta menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan melihat dari berbagai tuntutan permasalahan dan kebutuhan yang ada didalam masyarakat yang semakin lama semakin meluas sehingga membutuhkan solusi yang tepat agar dapat perlahan mengurangi permasalahan yang ada maka, hal inilah yang menjadi daya tarik dan faktor utama mengapa sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Tugas & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) Dalam Memberdayakan Masyarakat,” perlu diangkat dan harus lebih mendalam untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Wahab Solickin, 2015. *Analisis kebijakan*. PT. Bumi Angkasa, Jakarta.
- Blanchard Ken 2008. *Pemberdayaan Karyawan*. Amara Books, Yogyakarta.
- Eko Sutoro, 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press, Yogyakarta
- Eko Sutoro, 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. APMD Pers, Yogyakarta.
- Eko Sutoro, Widodo R Triputro, Supardal, 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*. APMD Press, Yogyakarta.
- Hagul Peter 1992. *Pengembangan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. CV Rajawali, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Marijan, Kacung, 2010. *Sistim Politik Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Mikkelsen Britha, 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mardikanto Totok, Soebiato Powerwoko, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong J. Lexy, 2011. *Metodologi Penelitian Kuakitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho E.W, 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Perss, Yogyakarta.

Soewignjo, 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia.

Surakhmad Winarno Ed, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung.

Suryabrata Sumadi, 1990. *Metodologi Penelitian*. CV. Rajawali, Jakarta ,

Suharto Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat*. PT Refika Aditama. Bandung.

Suyatno Hempri, Suparjan, 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.

Sunggono Bambang, 1994. *Hukum Dan Kebijakan Public*. Sinar Grafika, Jakarta.

Soetomo, 2012. *Kesewadayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soetomo, 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Usman Sunyoto, 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Winarto Budi, 2003. *Komparasi Organisasi Pedesaan*. Media Pressindo, Yogyakarta,

SUMBER LAIN

Sumber Jurnal :

Fatmawati Ending, 2010. *Perlunya Standar Oprasional Prosedur (SOP) Disebuah Perpustakaan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soetomo, 2011. *Evektifitas Kebijakan Sosial Dalam Pemecahan Masalah Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Sudarsono Nani, 2001. *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.

Soemadi. 2008. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. UPN"VETERAN", Yogyakarta.

Sumber PDF :

Mg Ana Budi Rahayu. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

Pemberdayaan Masyarakat, 2011.

Trisaktiyana. *Laporan Program Pemberdayaan*, 2013

Suharsini Arikunto. *Metode penelitian*.2006

Sumber Internet:

<https://Pramascita.Wordpress.Com/2013/06/07/Implementasi-Kebijakan-Publik/>

[Kamus besar bahasa Indonesia](#).

Skripsi:

A.F Ashadi Budi Utomo, 2010. Pemberdayaan Masyarakat Desa Oleh Pemerintah Desa Dan Credit Union. STPMD, Yogyakarta.

Darmaan Santosa. 2005. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat. STPMD, Yogyakarta.

Sunardi, 2004. Implementasi Kebijakan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan. Stpmd, Yogyakarta.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.